

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Wilayah perairan Indonesia mencakup sekitar dua pertiga dari total luas wilayah nasional, menjadikannya salah satu negara dengan potensi maritim terbesar secara global. Dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 108.000 km dan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

Keunggulan geografis ini didukung oleh keragaman komoditas perikanan seperti tuna, cakalang, tongkol, udang, bandeng, rumput laut, dan berbagai jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, produk perikanan Indonesia juga berperan penting dalam perdagangan global. Keberadaan laut sebagai sumber pangan dan ekonomi menjadikan sektor ini sangat relevan dengan isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 14 (Ekosistem Laut).

Dari sisi kontribusi ekonomi, sektor perikanan terus menunjukkan kinerja yang signifikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2023), sektor ini memberikan kontribusi sebesar 2,8% terhadap PDB nasional dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,2% per tahun. Selain itu, sektor perikanan juga menyerap jutaan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung, yang tersebar di seluruh rantai produksi, mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga distribusi. Peran ini menjadikan perikanan sebagai sektor yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam konteks pembangunan nasional, sektor kelautan dan perikanan telah menjadi bagian dari prioritas utama pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020–2024. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pembangunan berbasis wilayah dan sumber daya lokal melalui pendekatan ekonomi biru (blue economy). Pendekatan ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan konservasi ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini menjadi landasan bagi pengembangan sektor perikanan secara lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan ekonomi biru, KKP merancang lima program prioritas: (1) perluasan kawasan konservasi laut hingga minimal 30% wilayah pesisir, (2) penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (3) pengembangan budidaya laut dan pesisir secara berkelanjutan, (4) pengawasan

terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta (5) pengelolaan sampah laut melalui kampanye nasional seperti Bulan Cinta Laut. Program-program ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian sumber daya laut, tetapi juga meningkatkan daya saing sektor perikanan dalam rantai nilai global.

Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk sektor kelautan dan perikanan juga terus meningkat. Pada tahun 2024, pemerintah melalui KKP mengalokasikan dana sebesar Rp7,1 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi biru. Anggaran ini mencakup pembangunan infrastruktur kampung nelayan modern, modernisasi pelabuhan perikanan, pengembangan teknologi perikanan budidaya, serta penerapan sistem pemantauan laut berbasis digital seperti satelit nano dan Ocean Big Data. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor perikanan nasional secara menyeluruh.

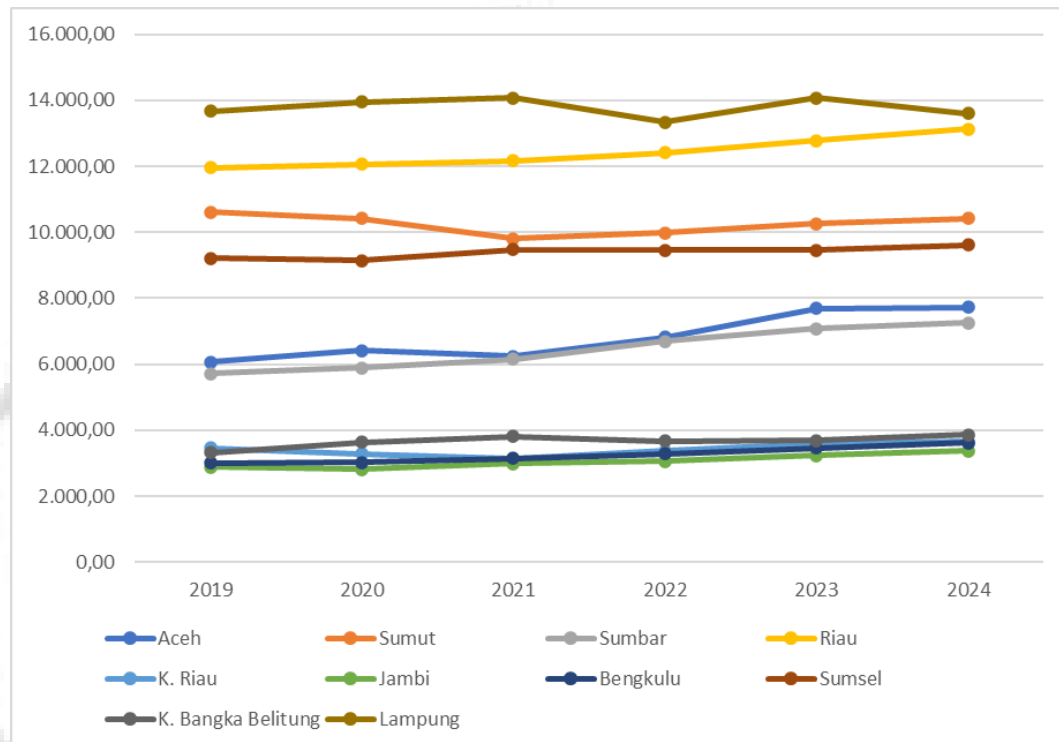
Di tingkat daerah, sektor perikanan telah menjadi prioritas pembangunan di berbagai provinsi pesisir seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Melalui integrasi RPJMD daerah dengan kebijakan nasional, berbagai program pembangunan seperti pembentukan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perikanan, serta revitalisasi sentra produksi perikanan dijalankan untuk mengoptimalkan potensi lokal. Hal ini mencerminkan adanya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengelola sektor perikanan secara strategis.

Lebih dari itu, sektor perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun konektivitas antarwilayah di Indonesia. Program tol laut dan

penguatan sistem logistik perikanan dirancang untuk mengatasi ketimpangan distribusi barang dan harga antar wilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tertinggal dan terluar. Dengan pendekatan ini, perikanan tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan nasional.

Perkembangan sektor perikanan di daerah tidak hanya menunjukkan seberapa besar potensi sumber daya laut yang dimiliki, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh sektor ini mampu berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Béné et al. (2016), perikanan berperan penting dalam menyediakan sumber pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan, terutama di wilayah pesisir. Selain itu, pertumbuhan sektor perikanan juga dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya seperti perdagangan, transportasi, hingga industri pengolahan hasil laut.

Setiap daerah di Sumatera memiliki karakteristik dan daya dukung yang berbeda dalam mengelola sektor perikanan. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi sektor ini secara lebih jelas, grafik berikut menyajikan data PDRB sektor perikanan di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2019 hingga 2024.



Sumber: Badan pusat Statistik Indonesia

**Gambar 1.1 Perkembangan PDRB Sektor Perikanan di Sumatera Tahun 2019-2024**

Berdasarkan gambar 1.1 diatas PDRB sektor perikanan dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan adanya tren yang umumnya meningkat di sepuluh provinsi di wilayah Sumatera, meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda di setiap daerah.

Secara umum, Provinsi Riau dan Lampung tercatat sebagai dua provinsi dengan nilai PDRB sektor perikanan tertinggi sepanjang periode tersebut. Riau yang sejak 2019 memiliki PDRB sebesar Rp11.948,92 miliar, terus meningkat hingga mencapai Rp13.125,11 miliar pada 2024. Demikian pula Lampung yang semula bernilai Rp13.676,51 miliar di tahun 2019, mengalami sedikit fluktuasi

namun tetap tinggi di angka Rp13.591,71 miliar pada 2024. Kedua provinsi ini menunjukkan peran strategis sektor perikanan dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, baik melalui kegiatan budidaya, tangkap, maupun industri pengolahan hasil perikanan.

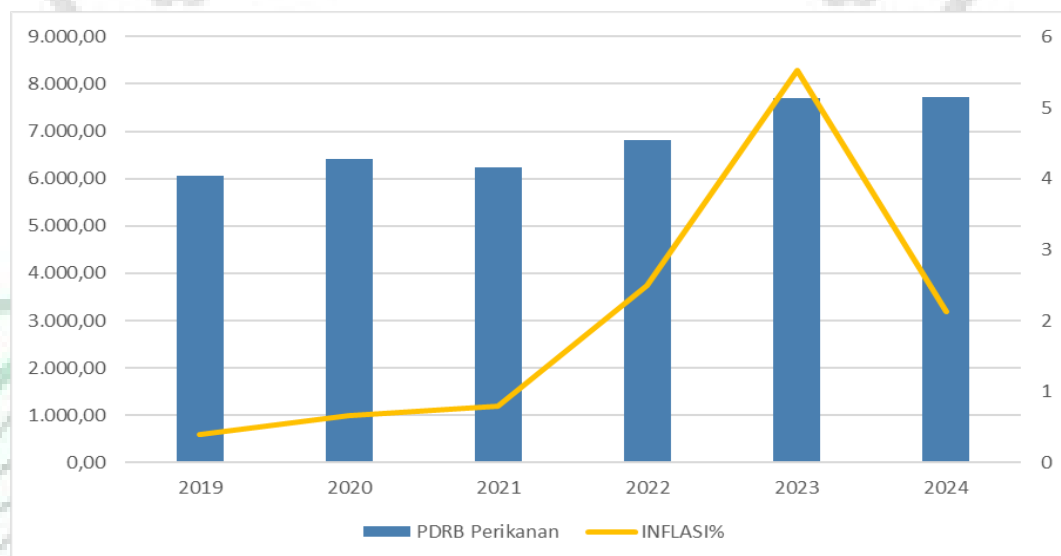
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) juga termasuk dalam kelompok provinsi dengan PDRB perikanan yang tinggi. Meskipun sempat menurun pada 2021 menjadi Rp9.800,05 miliar, Sumut kembali mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai Rp10.408,65 miliar di 2024. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan sektor perikanan pasca-pandemi yang cukup stabil di wilayah tersebut.

Sementara itu, Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami pertumbuhan yang lebih moderat namun cenderung stabil. Aceh, misalnya, mencatat peningkatan dari Rp6.069,35 miliar pada 2019 menjadi Rp7.727,17 miliar pada 2024. Begitu pula Sumbar dan Sumsel, yang masing-masing menunjukkan tren naik yang konsisten, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibanding Riau dan Lampung.

Untuk provinsi dengan skala PDRB sektor perikanan yang lebih kecil seperti Jambi, Kepulauan Riau (Kepri), Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, terlihat adanya peningkatan yang perlahan namun stabil. Contohnya, Jambi yang memiliki nilai PDRB sebesar Rp2.883,49 miliar pada 2019 meningkat menjadi Rp3.375,85 miliar di 2024. Hal yang sama juga terjadi di Bengkulu dan Bangka Belitung yang menunjukkan pertumbuhan bertahap dari tahun ke tahun.

Fluktuasi pada tahun 2020 dan 2021 di hampir semua provinsi kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang memperlambat aktivitas produksi, distribusi, dan pasar hasil perikanan. Namun demikian, tren peningkatan kembali mulai terlihat sejak 2022 hingga 2024, yang menunjukkan pemulihan sektor perikanan di berbagai wilayah Sumatera.

Perkembangan sektor perikanan di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Salah satu provinsi yang bisa dijadikan contoh adalah Provinsi Aceh, yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan di Aceh dari tahun 2019 hingga 2024 cenderung meningkat, meskipun diiringi oleh fluktuasi tingkat inflasi tahunan.



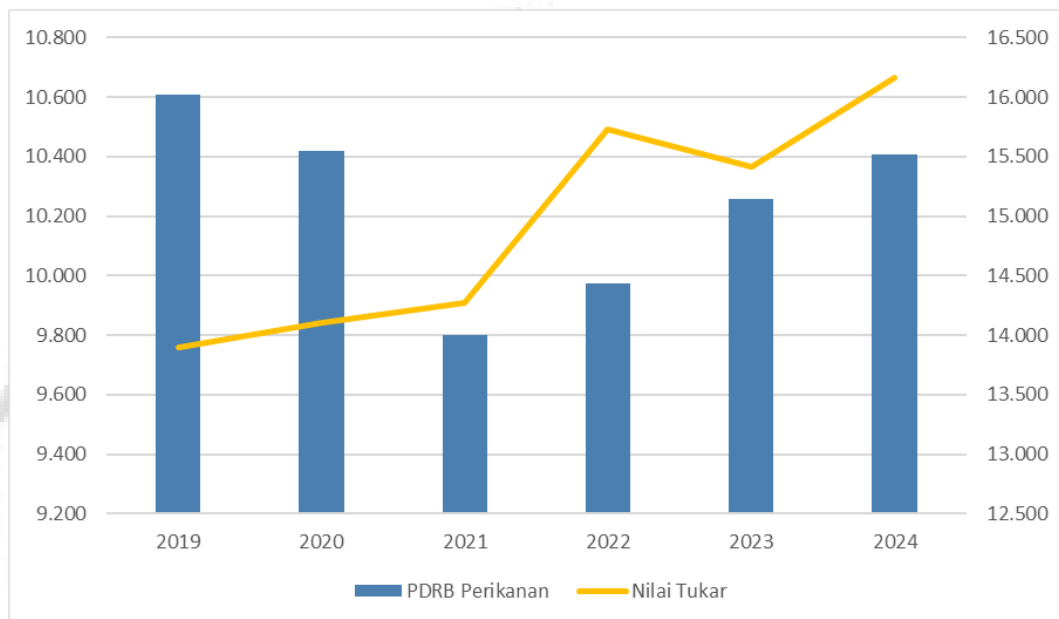
Sumber : BPS Indonesia (diolah)

**Gambar 1.2 Perkembangan PDRB Sektor Perikanan dan INFLASI di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024**

Jika dilihat dari gambar 1.2 di atas, secara umum PDRB sektor perikanan di Aceh mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2019, nilai PDRB berada di angka sekitar Rp6.069,35 miliar, dan terus meningkat hingga mencapai Rp7.727,17 miliar pada tahun 2024. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2021, tren pertumbuhannya tetap menunjukkan arah yang naik. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor perikanan di Aceh cukup tangguh dan konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, tingkat inflasi di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, inflasi berada pada angka rendah, yaitu 0,4%, lalu perlahan meningkat hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 sebesar 5,52%, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 2,12% pada tahun 2024. Kenaikan inflasi yang cukup tinggi di tahun 2023 biasanya berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun, menariknya, di tahun yang sama PDRB perikanan juga justru mengalami kenaikan yang cukup besar, menandakan bahwa sektor ini tetap mampu tumbuh di tengah tekanan harga.

Fenomena ini selaras dengan pendapat FAO (2022) yang menyebutkan bahwa permintaan terhadap ikan bersifat inelastis. Artinya, meskipun terjadi kenaikan harga akibat inflasi, konsumsi masyarakat terhadap ikan tidak mengalami penurunan yang drastis karena ikan merupakan salah satu sumber protein utama. Selain itu, menurut Asche dan Smith (2010), sektor perikanan memiliki karakteristik yang cukup kuat terhadap guncangan ekonomi, sehingga tetap memberikan kontribusi pada pertumbuhan daerah.



*Sumber: BPS Indonesia (diolah)*

**Gambar 1.3 Perkembangan PDRB Sektor Perikanan dan Nilai Tukar di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024**

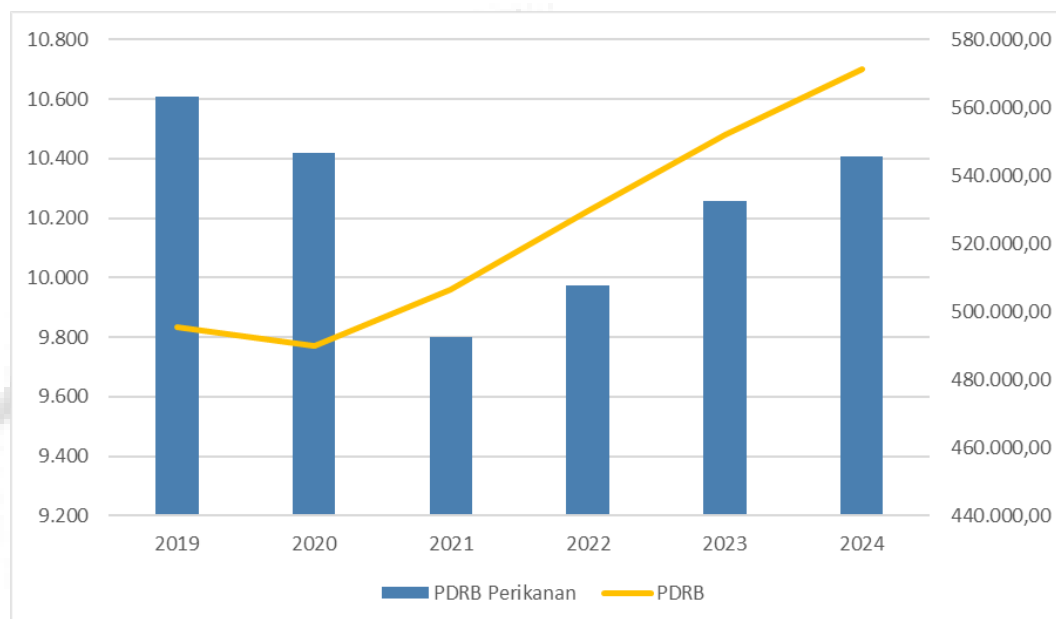
Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, terlihat bahwa perkembangan PDRB sektor perikanan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2019 hingga 2024. Pada awal periode, yakni tahun 2019, nilai PDRB sektor ini tercatat cukup tinggi, mencapai lebih dari 10.600 miliar rupiah. Namun, dalam dua tahun berikutnya, yaitu 2020 dan 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai titik terendah sekitar 9.800 miliar rupiah. Setelah itu, terjadi tren pemulihan dengan nilai PDRB yang kembali meningkat secara bertahap hingga tahun 2024.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam periode yang sama mengalami kecenderungan menguat (nilai tukar naik), dari sekitar Rp14.000 per dolar pada 2019 menjadi lebih dari Rp16.000 pada 2024. Pergerakan

ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, nilai tukar rupiah terus melemah. Kondisi ini mencerminkan bahwa dinamika nilai tukar rupiah memiliki keterkaitan dengan kinerja sektor perikanan, khususnya dalam konteks ekspor. Menurut Appleyard dan Field (2014), perubahan nilai tukar berperan penting dalam menentukan daya saing produk ekspor suatu negara. Ketika nilai tukar rupiah melemah, maka harga produk perikanan Indonesia di pasar internasional menjadi lebih murah, sehingga lebih kompetitif dan berpotensi mendorong peningkatan ekspor. Dalam konteks Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi dengan aktivitas ekspor perikanan yang cukup besar, tren ini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan nilai tambah di sektor perikanan.

Lebih lanjut, Todaro dan Smith (2012) menjelaskan bahwa sektor-sektor ekonomi yang terintegrasi dengan perdagangan internasional sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Dalam hal ini, sektor perikanan Sumatera Utara yang sebagian produksinya ditujukan untuk pasar ekspor akan terdorong untuk tumbuh seiring dengan nilai tukar yang melemah, selama didukung oleh produksi yang stabil dan akses pasar yang memadai.

Oleh karena itu, hubungan antara PDRB sektor perikanan dengan nilai tukar menjadi penting untuk dianalisis. Fluktuasi nilai tukar rupiah tidak hanya menjadi indikator kondisi makroekonomi, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap performa sektor perikanan, terutama di provinsi yang memiliki keterkaitan tinggi dengan perdagangan luar negeri. Analisis terhadap variabel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana sektor perikanan merespons tekanan eksternal sekaligus peluang dalam perekonomian global.



Sumber: BPS Indonesia (diolah)

**Gambar 1.4 Perkembangan PDRB Sektor Perikanan dan PDRB daerah di Provinsi Riau Tahun 2019-2024**

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, terlihat adanya dinamika antara nilai PDRB sektor perikanan dengan Pendapatan (PDRB) di Provinsi Riau selama periode 2019 hingga 2024. PDRB sektor perikanan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020 hingga 2021, lalu kembali meningkat secara bertahap hingga 2024. Di sisi lain, Pendapatan (PDRB) Provinsi Riau justru menunjukkan tren yang cenderung meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor perikanan bukan sektor dominan dalam struktur ekonomi Riau, namun tetap memiliki peran dalam menopang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya menganalisis kontribusi sektoral dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Menurut Sukirno (2016), PDRB

merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu, sehingga perubahan pada sektor-sektor penyusunnya termasuk sektor perikanan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan kata lain, meskipun kontribusi sektor perikanan terhadap total PDRB tidak sebesar sektor industri atau pertambangan di Riau, keberadaannya tetap penting, terutama dalam mendukung diversifikasi ekonomi dan ketahanan pangan.

Selain itu, Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk di daerah non-perkotaan. Maka dari itu, peningkatan kinerja sektor perikanan dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor ekonomi lainnya, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini menjadi pelaku utama dalam aktivitas perikanan.

Dengan demikian, hubungan antara PDRB sektor perikanan dan Pendapatan (PDRB) mencerminkan bagaimana perikanan tetap relevan dalam perekonomian daerah, termasuk di wilayah dengan struktur ekonomi kompleks seperti Riau. Analisis terhadap hubungan ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain pentingnya memahami data dan teori yang relevan, terdapat juga kesenjangan penelitian (research gap) yang menarik untuk dikaji lebih lanjut,

khususnya mengenai hubungan antara variabel makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan Pendapatan (PDRB) terhadap PDRB sektor perikanan.

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah membahas topik yang serupa, namun belum secara spesifik menyoroti sektor perikanan di tingkat provinsi. Misalnya, studi oleh Akseptori et al. (2023) menyebutkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB sektor perikanan secara nasional dalam jangka pendek. Akan tetapi, inflasi yang stabil justru memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori ekonomi makro yang menyatakan bahwa inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap hasil perikanan, dengan bukti empiris yang tidak selalu mendukung hal tersebut.

Selanjutnya, variabel nilai tukar lebih banyak dibahas dalam kaitannya dengan ekspor produk perikanan. Beberapa studi menyatakan bahwa nilai tukar yang menguat dapat menekan daya saing ekspor, sedangkan depresiasi rupiah cenderung meningkatkan permintaan pasar luar negeri terhadap produk perikanan. Namun, belum banyak penelitian yang menghubungkan nilai tukar dengan PDRB sektor perikanan secara langsung, terutama di wilayah yang memiliki basis produksi dan ekspor kuat seperti Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, variabel Pendapatan (PDRB) sebagai indikator makro pertumbuhan daerah justru jarang digunakan sebagai faktor yang memengaruhi PDRB sektor perikanan. Padahal, dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat mendorong pengembangan sektor-

sektor unggulan daerah, termasuk perikanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian antara pendekatan sektoral dan makro yang belum banyak dieksplorasi, terutama pada wilayah kepulauan seperti Sumatera yang memiliki potensi perikanan yang besar.

Dengan adanya kesenjangan teori dan hasil empiris, serta minimnya studi yang membahas hubungan antara inflasi, nilai tukar, dan Pendapatan (PDRB) terhadap PDRB sektor perikanan di tingkat provinsi, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul: **“Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Pendapatan (PDRB) terhadap PDRB Sektor Perikanan di Beberapa Provinsi Sumatera Tahun 2019–2024”** Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur yang ada serta memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah berbasis sektor perikanan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB di beberapa provinsi Sumatera belum optimal meskipun potensi sumber daya sangat besar.
2. Fluktuasi inflasi di tiap provinsi diduga memengaruhi daya beli dan konsumsi produk perikanan, namun belum banyak dikaji hubungannya dengan PDRB sektor perikanan.

3. Nilai tukar berpotensi memengaruhi kinerja ekspor dan input sektor perikanan, tetapi belum banyak diteliti secara langsung terhadap PDRB sektor perikanan tingkat provinsi.
4. Pertumbuhan Pendapatan (PDRB) tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan sektor perikanan, sehingga perlu dianalisis hubungan keduanya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor ekonomi makro yang diduga berpengaruh terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Inflasi (X1), Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (X2), Pendapatan (PDRB) provinsi (X3) dan untuk variabel dependennya yaitu PDRB Sektor Perikanan (Y)
3. Penelitian ini dilakukan mulai dari tahun 2019-2024.
4. Provinsi yang diteliti terbatas pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Sumatera?
2. Apakah terdapat pengaruh nilai tukar terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Sumatera?
3. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan (PDRB) terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Sumatera?
4. Apakah terdapat pengaruh inflasi, nilai tukar, dan Pendapatan (PDRB) secara simultan terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Sumatera?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada poin-poin rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan (PDRB) terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar, dan Pendapatan (PDRB) secara simultan terhadap PDRB sektor perikanan di beberapa provinsi di Sumatera.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji pengaruh inflasi, nilai tukar, dan Pendapatan (PDRB) terhadap PDRB sektor perikanan, khususnya di wilayah Sumatera. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang ekonomi pembangunan daerah.

### 2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan di sektor perikanan. Dengan mengetahui faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kinerja PDRB sektor perikanan, pemerintah dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat, terukur, dan berpihak pada daerah-daerah dengan potensi perikanan yang besar.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dan komunitas nelayan, mengenai bagaimana kondisi ekonomi makro dapat memengaruhi sektor perikanan. Dengan meningkatnya pemahaman ini, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan ekonomi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.